

CONSUMER PROTECTION

KK
Dag 06/03
Pan
P

SKRIPSI

AGUSWULAN PANCANINGTHYAS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PEMAKAI AJINOMOTO**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI AJINOMOTO

SKRIPSI

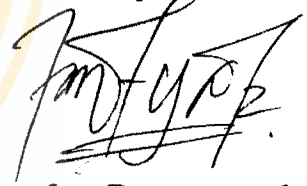
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen pembimbing

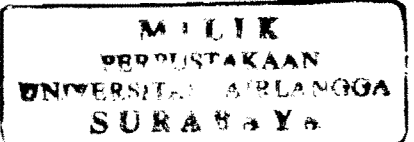


Bambang Sugeng Ariyadi S. SH. M.H
NIP. 132049476

Penyusun



Aguswulan Pancaningthyas
NIM. 039814676



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

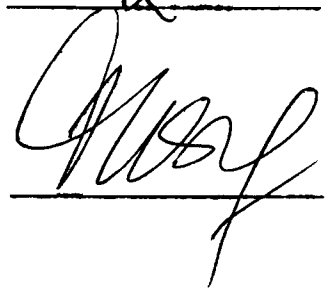
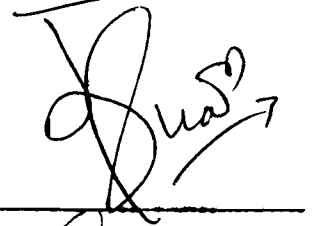
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan para penguji
Pada tanggal : 17 Juni 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., MS.

Anggota : 1. Bambang Sugeng Arlyadi S.,SH, M.H.

2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN.

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, akan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT. Ajinomoto merupakan pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan barang berupa vetsin atau bumbu penyedap masakan kepada masyarakat di Indonesia. Sebagai pelaku usaha, PT Ajinomoto dalam melakukan proses produksinya menggunakan bahan sebagai katalis yaitu bactozytone yang terbuat dari pankreas babi.
- b. Bactozytone yang terbuat dari pankreas babi sebagai katalis dalam proses produksi vetsin atau bumbu penyedap masakan oleh PT. Ajinomoto, maka produk yang dihasilkan tidak halal atau dengan kata lain merupakan produk haram yang tidak sesuai dengan label pada kemasan.
- c. Tindakan PT. Ajinomoto memproduksi vetsin atau bumbu penyedap masakan dengan menggunakan bactozytone bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dikatakan atau dianggap sebagai suatu

pelanggaran yang berupa perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen.

- d. Konsumen pemakai produk Ajinomoto yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum dalam meminta ganti rugi kepada PT. Ajinomoto selaku pelaku usaha dengan menggunakan cara penyelesaian sengketa yang ada.

2. SARAN

- a. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto yaitu melanggar pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga merupakan perbuatan pidana, seyogyanya dijatuhi sanksi pidana yang meliputi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menjadi pelajaran bagi PT. Ajinomoto sendiri dan pelaku usaha lain apabila melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.
- b. Sehubungan dengan masalah perlindungan konsumen yang tergolong masih baru dan banyaknya konsumen yang belum menyadari hak-haknya, maka diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat agar dapat mengetahui apa saja hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Selain itu pemerintah harus lebih gencar

mensosialisasikan UUPK kepada masyarakat untuk pengetahuan masyarakat sebagai konsumen agar tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha.

